

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG
DIDAFTARKAN PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR)**

CHRISTIAN EKA FEBRIANTO

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan penulisan ini sebagai syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis untuk mengetahui tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja yang tercatat pada instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan. Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan, dapat ditempuh melalui upaya hukum yaitu: secara litigasi maupun non litigasi. Bahwa tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama harus didasari kemauan bebas kedua belah pihak. Materi muatan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta pengusaha wajib mendaftarkan pada instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan. Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu melalui upaya hukum perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi dan pengadilan hubungan industrial

Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja Bersama

Abstract – The purpose of this writing as a requirement for graduation and get a master's degree of law at the faculty of Surabaya University. The practical purpose to determine the procedures for creation and registration of collective bargaining agreements between employers and trade union registered in the field of labor government agencies. Legal protection for workers to fight for their rights and interests in improving well-being, can be reached through the efforts of the law that is in litigation and non litigation. The procedure of making collective agreements should be based on the free will of both parties. The substance set forth in the collective agreement must not conflict with laws and regulations and the employers must register with government agencies for labor affairs. Legal protection for workers in resolving industrial relations disputes is through the efforts of law bipartite, negotiations, conciliation, arbitration, mediation and industrial relations court.

Keywords: Legal protection, collective agreement